



TRANSFORMASI SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Aris Setiawan Karim¹, Luqmanul Hakiem Ajuna², Sri Dewi Yusuf³
^{1,2,3}IAIN Sultan Amai Gorontalo

History Article

Article history:

Received Feb 07, 2023
Approved Feb 25, 2023

Keywords:

*Student Organization,
Financial,
Management*

ABSTRACT

This study aims to examine the phenomenon of student organization financial management at IAIN Sultan Amai Gorontalo. This study uses a qualitative method with a case study approach to student organizations at IAIN Sultan Amai Gorontalo while the research is starting from the process of planning, organizing, supervising and reporting accountability. This phenomenon finds answers, namely the financial management of student organizations is not well organized, the campus provides the potential for student organizations to commit fraud resulting in organizational disorientation starting from cheating during the implementation process, manipulation of accountability reporting, as well as the potential for TGR (claims for compensation) against students.

ABSTRAK

Penelitian Ini bertujuan mengkaji fenomena pengelolaan keuangan organisasi kemahasiswaan di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus organisasi kemahasiswaan yang berada di IAIN Sultan Amai Gorontalo adapun yang diteliti adalah mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pelaporan pertanggungjawaban. Fenomena ini menemukan jawaban yaitu pengelolaan keuangan organisasi kemahasiswaan tidak tertata dengan baik, kampus memberikan Potensi kepada organisasi kemahasiswaan untuk melakukan kecurangan sehingga memunculkan disorientasi organisasi mulai dari kecurangan saat proses pelaksanaan, manipulasi laporan pertanggungjawaban, serta potensi TGR (tuntutan ganti rugi) terhadap mahasiswa.

© 2023 Jurnal Ilmiah Global Education

*Corresponding author email: Sridewiyusuf@iaingorontalo.ac.id

PENDAHULUAN

Organisasi kemahasiswaan merupakan satu entitas sosial di dalam perguruan, kebebasan berkumpul, berserikat, dan berorganisasi telah diatur dalam pasal 28 E ayat (3) Undang-undang dasar 1945. Yang juga di afirmasi melalui Undang – undang nomor 9 tahun 1998, tentang kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di depan umum.

Tujuan dibentuknya organisasi kemahasiswaan intra kampus telah tertera di dalam undang – undang nomor 12 tahun 2012 tentang organisasi kemahasiswaan intra kampus yang menjelaskan bahwa perguruan tinggi menyediakan sarana prasarana dan dana (biaya) untuk mendukung kegiatan mahasiswa, bertujuan untuk; mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi mahasiswa, mengembangkan kreativitas, dan mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Hasil pemeriksaan satuan pemeriksa intern (SPI) IAIN Sultan Amai Gorontalo, terdapat Tuntutan Ganti Rugi (TGR) pada kegiatan organisasi kemahasiswaan pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp.52.750.411 yang diperiksa pada tahun 2018, mengakibatkan penanggung jawab kegiatan mengganti keseluruhan biaya tersebut dalam hal ini di tingkatan fakultas Wakil Dekan III sedangkan di tingkatan Institut Wakil Rektor III. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut telah dilakukan pemetaan akar permasalahannya yaitu pada pembuatan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan. Hal ini membuat penanggung jawab merasa dirugikan dikarenakan yang menggunakan dan mengelola keuangan yaitu mahasiswa, sehingga jika terjadi TGR, mahasiswa tersebutlah yang mengganti jika terjadi kerugian.

Pada tahun anggaran 2021 Tuntutan Ganti Rugi (TGR) kegiatan organisasi kemahasiswaan yang ditemukan oleh satuan pemeriksa intern (SPI) hasil pemeriksaan tahun 2022 yaitu sebesar Rp.7.550.000, berbeda dengan tahun - tahun sebelumnya, di tahun 2021 tuntutan ganti rugi (TGR) yang sebelumnya di limpahkan ke Wakil Rektor dan Wakil Dekan telah berganti yaitu dilimpahkan langsung kepada mahasiswa yang bersangkutan, akibatnya ada dua orang mahasiswa yang dikenakan TGR diakibatkan belum memasukan laporan pertanggungjawaban kegiatan, Hal ini tentu memerlukan penjelasan kepada organisasi kemahasiswaan secara masif baik secara formal berupa pelatihan dan sosialisasi

Sepengetahuan peneliti ada beberapa hal yang harus dibenahi di dalam pengelolaan keuangan organisasi kemahasiswaan intra kampus, hal ini didukung dengan pengalaman panjang peneliti yang juga turut terlibat aktif di dalam pengelolaan keuangan organisasi kemahasiswaan intra kampus, dengan demikian topik ini sangat menarik untuk dituliskan selain meningkatkan ilmu pengetahuan juga dapat direkomendasikan sebagai naskah akademik dalam perbaikan pengelolaan keuangan organisasi kemahasiswaan intra kampus.

Jurnal ini membahas bagaimana pengelolaan keuangan organisasi kemahasiswaan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) serta model transformasi pengelolaan keuangan dan upaya *Preventif* TGR mahasiswa.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan menjelaskan makna dibalik realitas sosial yang terjadi, Pendekatan kualitatif digunakan agar pengumpulan data tidak bersifat kaku serta selalu sesuai dengan keadaan di lapangan, pendekatan dalam penelitian kualitatif yang mencoba menjelaskan atau mengungkap fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu penelitian ini dilakukan pada situasi yang alami sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji Dengan pendekatan kualitatif, data bersifat emosi, norma, keyakinan, kebiasaan, sikap mental, dan budaya yang dianut seseorang maupun sekelompok orang dapat ditemukan (Moleong 2007)

Situs penelitian yang dipilih yaitu pada organisasi intra dan civitas akademika kampus pada IAIN Sultan Amai Gorontalo Ketersediaan akses dan rapport (kedekatan) dengan informan juga sangat penting dikarenakan tema dalam penelitian ini bersifat “rawan” dan “sensitif” bagi sebagian aktor Rapport dimanfaatkan untuk menggali informasi yang lebih dalam tentang pengelolaan dan pelayanan keuangan organisasi kemahasiswaan secara tidak eksplisit.

Informan pada penelitian ini adalah para personal berpengalaman dalam bidang keuangan yang memenuhi beberapa kriteria yang terlibat dalam organisasi kemahasiswaan, yaitu beberapa aparatur organisasi organisasi intra kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo dan fungsional keuangan.

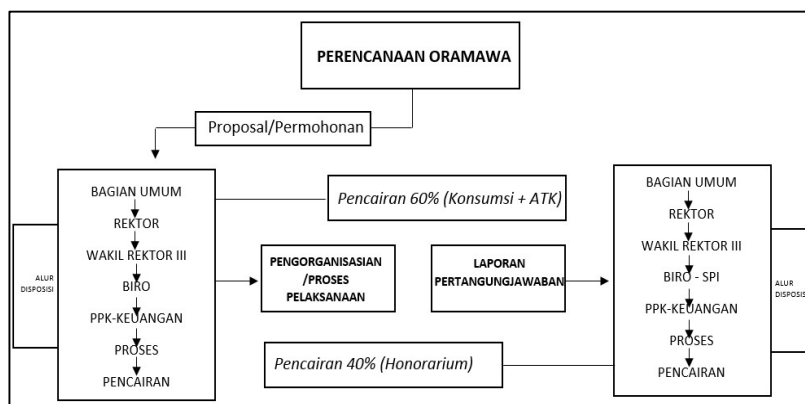
Tempat wawancara pada penelitian ini yaitu kantor/kampus serta tempat tinggal informan dengan membuat janji terlebih dahulu terkadang juga peneliti melakukan wawancara ketika informan berada di kampus.

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan pemahaman subjektif para informan terkait pengalaman aktivitas organisasi yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengawasan, sampai pada pembuatan laporan pertanggungjawaban. Selanjutnya dilakukan penguraian dan pengungkapan realita yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya untuk menemukan intisari dari fenomena di lapangan Intisari tersebut akan diungkap mengenai sikap-sikap berdasarkan fenomena di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alur Pengelolaan keuangan birokrasi tidak selaras dengan perencanaan Organisasi kemahasiswaan

Alur pengelolaan keuangan dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan telah diatur melalui regulasi dan kebijakan kampus, berikut alur yang dapat digambarkan lewat wawancara;



Gambar 1. Alur Proses Pencairan anggaran Organisasi Mahasiswa

Pertama, organisasi kemahasiswaan melakukan perencanaan kegiatan dalam bentuk *Term Of Reference* (TOR), menyusun panitia pelaksana, dan rancangan anggaran belanja (RAB), Dalam wawancara yang peneliti dapatkan dari fungsional keuangan bahwa jenis belanja organisasi kemahasiswaan dalam pengelolaan kegiatan ada tiga yaitu; ATK, Konsumsi, dan Honorarium.

“kalau untuk jenis pembelanjaan dalam kegiatan organisasi memang hanya ATK, konsumsi, dan honor”

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa keterbatasan organisasi kemahasiswaan bereksprei dalam mengelola keuangan pada pelaksanaan kegiatan yang diikat pada tiga jenis pembelanjaan, Konsumsi, ATK, dan Honorarium. Hal ini dapat menyebabkan tidak maksimal nya pelaksanaan kegiatan.

Kedua, setelah melakukan perencanaan dalam bentuk proposal kegiatan ketua organisasi dan panitia pelaksana mengajukan permohonan pencairan dana, yang di tujukan kepada Rektor, yang sebelumnya harus dimasukan pada bagian umum untuk dimasukan dalam agenda, setelah di disposisi oleh rektor kemudian ke wakil rektor III dan setelah itu ke BIRO, selanjutnya kebagian Keuangan dan Pejabat pembuat komitmen (PPK), terakhir di proses dan menunggu pencairan. Pada tahap proses pencairan, organisasi kemahasiswaan harus menunggu estimasi waktu yang tidak pasti, sehingga membuat perencanaan kegiatan yang telah disusun baik itu tempat dan waktu pelaksana bisa sewaktu waktu berubah

karena harus menunggu anggaran yang dicairkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa ketua organisasi intra kampus ditemukan bahwa pencairan anggaran paling lambat bisa sampai 15 hari dan paling cepat 7 hari dengan beberapa alasan yang di sampaikan oleh pihak kampus, seperti apa yang diungkapkan oleh Adila salah satu ketua HMJ di fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;

“iya kak, untuk pencairan anggaran organisasi kemahasiswaan yang pernah kami alami yaitu paling lama itu dua minggu sedangkan paling cepat lima atau tujuh hari”

Setelah peneliti dalam apa penyebab lambatnya pencairan anggaran organisasi kemahasiswaan, ternyata menunggu SK panitia, yang harus ditandatangani oleh bapak Rektor, karena salah satu dasar dapat di cairkan nya anggaran yaitu SK kepanitiaan yang dibubuhi tanda tangan Rektor, adila menambahkan;

“alasan dari pihak rektorat itu kak, pak rektor masih ada di luar daerah, sedangkan untuk pencairan anggaran harus ada sk panitia yang tandatangani pak rektor, jadi harus menunggu beliau balik sedangkan kegiatan suda dekat ”

Berbeda dengan Rahmi, ketua HMJ di salah satu fakultas syariah, menuturkan bahwa proses pencairan itu lambat atau tidaknya tergantung dengan pengawalan atau pengecekan secara berkala, karena pihak kampus kadang lupa dengan permohonan yang telah dimasukan. Sehingga harus dilakukan pengecekan;

“tidak semua penyebab lambatnya pencairan itu karena SK rektor ada juga karena pihak kampus lupa dengan tor yang telah kami masukan, sehingga perlu pengecekan untuk diingatkan dan pengawalan tiap saat”

Anggaran organisasi kemahasiswaan tidak sesuai dengan jumlah program yang telah di rumuskan

Ketiga, proses pengorganisasian ini juga sering terjadi pro kontra, ada yang sesuai dengan alur rencana, ada juga yang tidak sesuai, misalnya saja soal road map kegiatan dan anggaran belanja yang disusun di dalam proposal berbeda dengan saat pelaksanaan kegiatan. Hal ini memicu perdebatan antar pengurus, alasan kenapa berubah? yaitu menyesuaikan dengan jumlah anggaran, sedangkan jumlah program kerja tidak berbanding dengan pagu anggaran yang disediakan oleh pihak kampus, marsel ketua HMJ di salah satu fakultas Ushuludin dan dakwah mengungkapkan bahwa;

“alasan kenapa rencana belanja berubah ubah itu kak, karena menyesuaikan dengan anggaran yang di berikan oleh kampus, sedangkan mengingat program kerja yang masih banyak yang harus dibiayai , makanya sering tidak sesuai dengan RAB yang tertera di proposal, ”

Setelah peneliti mendalami lebih lanjut ternyata keterlibatan organisasi di tingkatan jurusan dalam hal ini HMJ tidak dilibatkan dalam perumusan program di tingkatan fakultas sehingga aspirasi program yang telah di rancang oleh hmj tidak tersampaikan ke tingkat institut untuk menjadi bahan pertimbangan, yang disayangkan adalah HMJ tinggal menerima hasil pembagian jumlah program dan anggaran yang telah di rumuskan di tingkatan institut. Askar menambahkan bahwa;

“dana yang kami dapatkan tidak cukup untuk membiayai program. Sehingga kita harus menghemat dana untuk bisa di plot pada kegiatan lain. Apalagi setahu kami tidak ada pertemuan formal di tingkatan fakultas dalam membahas program kerja dan jumlah program yang bisa diakomodir dalam menggunakan dana kampus, sehingga bisa menjadi acuan dalam pendanaan organisasi”

Diakhir tahun 2022 SEMA Institut (SEMA I) organisasi di tingkatan universitas mengundang bapak wakil rektor II bidang perencanaan dan keuangan, dalam pertemuan itu bapak wakil rektor II memaparkan jumlah anggaran organisasi yang belum dan suda terealisasi, menurut penuturan dari anisa bahwa, pengelolaan keuangan organisasi kemahasiswaan oleh pihak kampus dalam mendistribusikan anggaran dinilai tidak ter atur, kenapa demikian? Karena di akhir tahun anggaran masih tersisa Rp.707.924.000. ditambah lagi organisasi kemahasiswaan didorong untuk mengadakan kegiatan dengan jangka waktu yang terlalu singkat, dan harus memasukan laporan pertanggungjawaban.

The image shows a screenshot of a financial report titled "LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022". The report is for the period of November 2022. It details the budget for various activities and departments. The report is organized into columns for "Uraian" (Description), "Page Realisasi", "Lock Page", "Periode Lalu", "Periode Ini", "s.d. Periode", and "TSA ANGGARAN". The total budget for the year is 707,924,000. The report shows that the budget is not fully utilized, with a significant amount remaining at the end of the year.

Uraian	Page Realisasi	Lock Page	Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	TSA ANGGARAN
Jumlah Belanjanya	1,675,201,000	0	882,460,000	84,646,000	967,106,000	57.34 %
DK Program Pendidikan Tinggi	1,675,201,000	0	882,460,000	84,646,000	967,106,000	57.34 %
DK.2132 Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	1,675,201,000	0	882,460,000	84,646,000	967,106,000	57.34 %
B02C Tahap Kedua Keterlaksanaan Publikasi Bidang Pendidikan	1,675,201,000	0	882,460,000	84,646,000	967,106,000	57.34 %
B02C.002 PTNEN yang menyangkut keluas Laporan pertanggungjawaban melalui PMPB	1,675,201,000	0	882,460,000	84,646,000	967,106,000	57.34 %
003 Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan (PMPB)	1,675,201,000	0	882,460,000	84,646,000	967,106,000	57.34 %
053.AA KEGIATAN DEWAN MAHASISWA INSTITUT	30,000,000	0	30,200,000	6,000,000	36,200,000	47.33 %
521.131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	675,000	0	0	0	0	0.00 %
521.211 Belanja Bahan	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000	99.82 %
521.219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	15,300,000	0	6,200,000	6,000,000	12,200,000	79.74 %
053.AB KEGIATAN SENAT MAHASISWA INSTITUT	30,000,000	0	10,296,000	11,846,000	22,142,000	73.81 %
521.131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	675,000	0	0	0	0	0.00 %
521.219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	29,295,000	0	10,296,000	11,846,000	22,142,000	75.81 %
053.AC KEGIATAN PEMILIHAN INSTITUT	12,574,000	0	10,080,000	0	10,080,000	80.29 %
521.219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	12,574,000	0	10,080,000	0	10,080,000	80.29 %
053.AD KEGIATAN PEMILIHAN SENAT MAHASISWA INSTITUT	12,574,000	0	0	0	0	0.00 %
521.219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	12,574,000	0	0	0	0	0.00 %
053.AE KEGIATAN PEMILIHAN DEWAN MAHASISWA RTK	3,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	66.47 %
521.219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	66.47 %
053.AF KEGIATAN PEMILIHAN DEWAN MAHASISWA FS	3,000,000	0	0	0	0	0.00 %
521.219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,000,000	0	0	0	0	0.00 %
053.AG KEGIATAN PEMILIHAN DEWAN MAHASISWA FUD	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	99.70 %
521.219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	99.70 %
053.AH KEGIATAN PEMILIHAN DEWAN MAHASISWA FESB	3,000,000	0	1,989,000	0	1,989,000	66.30 %
521.219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,000,000	0	1,989,000	0	1,989,000	66.30 %
053.AI KEGIATAN SEMA DEWA FAKULTAS DAN HUKU FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUPAN (TK) KEGIATAN	102,860,000	0	54,700,000	24,000,000	78,700,000	76.53 %

Gambar 2. Laporan Ketersediaan dana Detail TA.2022

“kita kaget saja di akhir tahun seperti ini masih banyak anggaran yang tersisa, padahal harusnya suda selesai mengingat akhir tahun seperti ini suda harus menyusun pelaporan keuangan.buntutnya kita organisasi yang ribet karena dituntut harus menghabiskan anggaran itu, ditambah lagi kita harus gontok gontokan lagi menyusun laporan pertanggungjawaban”

Setelah diselidiki lebih dalam lagi ternyata ada beberapa organisasi kemahasiswaan yang belum membuat kegiatan, alasannya karena masa kerja organisasi yang seharusnya 1 tahun dalam 1 periode tetapi baru terhitung semenjak dilantik pada bulan juni, anisa menuturkan dalam hasil wawancara;

“kita dilantik bulan juni, jadi hanya terhitung masa kerja organisasi terhitung 1 semester. jadi kalau dilihat, kenapa anggaran masih tersisa, karena kami tidak punya cukup banyak waktu, karena organisasi kemahasiswaan baru dilantik bulan Juni belum lagi ditambah dengan proses pencairan anggran yang membutuhkan banyak waktu ”

Organisasi kemahasiswaan terpaksa memanipulasi Laporan Pertanggungjawaban

Keempat, panitia pelaksana memasukan laporan pertanggungjawaban disertai dengan surat permohonan pencairan Honor kepanitiaan. dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban, bendahara umum dan penanggungjawab kegiatan mempunyai peranan penting dalam pembuatan LPJ, karena untuk mendapatkan honor kepanitiaan harus menyelesaikan laporan terlebih dahulu, mengingat panitia pelaksana telah bekerja untuk menyukseskan kegiatan, seperti diketahui konsekwensi tidak memasukan LPJ yaitu panitia pelaksana tidak mendapatkan honor. Seperti yang diungkapkan oleh fungsional keuangan:

“bagi yang tidak memasukan laporan, sesuai dengan regulasi pengelolaan keuangan, tidak bisa mendapatkan honor panitia dalam hal ini 40% dari total anggaran 1 kegiatan yaitu dengan jumlah Rp.3.000.000”

Peneliti menemukan bahwa ada laporan yang terpaksa dimanipulasi untuk mendapatkan honor panitia karena harus menyesuaikan dengan format laporan yang telah ditentukan oleh pihak kampus dan ini suda menjadi hal yang wajar di organisasi. Ini bertentangan dengan moralitas sebagai mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi agam islam, sedangkan secara syariah, lembaga keuangan yang selalu mengedepankan akhlakuk Karimah dalam menjalankan organisasinya (Ajuna,L.H. :2021) Menurut hasil wawancara dengan salah satu ketua DEMA F menuturkan;

“so hal yang biasa itu ka, kalu tidak bagitu olo tidak mo dicairkan honor panitia, jadi harus mo manipulasi mulai dari tanda tangan palsu, nota, baru dengan cap, banyak sih yang memanipulasi LPJ karna so jadi hal yang biasa di lingkungan organisasi”

Beberapa manipulasi yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan dalam pembuatan laporan;

Menaikan harga barang

Realisasi pembelanjaan barang tidak sesuai dengan Rancangan anggaran belanja (RAB) yang tertera pada Proposal kegiatan, menaikkan estimasi harga lebih tinggi, hal ini di ungkapkan oleh dila salah satu ketua hmj;

“kami terpaksa menaikkan harga di dalam Rencana anggaran belanja (RAB) karena di tuntutan harus sesuai dengan ketentuan pihak kampus, misalnya dana yang kami terima Rp.6.000.000, maka kami harus mencari akal bagaimana cara merancang RAB yang harus sesuai dengan dana yang tersedia meskipun pada realisasinya di lapangan saat pembelanjaan tidak sesuai dengan yang ada di RAB”

Tanda tangan palsu

Pada pelaporan pertanggung jawaban kegiatan dibutuhkan daftar hadir peserta, daftar penerima konsumsi ,sertifikat dll pada daftar tersebut memiliki kolom tanda tangan, kebanyakan panitia pelaksana menemukan kesulitan saat membuat laporan pertanggungjawaban diakibatkan karena ada kolom peserta yang kosong, sehingga mereka harus mengarang tanda tangan peserta untuk pemenuhan laporan, Abdul salah satu ketua hmj di salah satu fakultas tarbiya dan keguruan menuturkan;

“saat pembuatan lpj kami terpaksa mengarang tanda tangan kak, untuk keperluan laporan karena ada nama yang di dalam daftar tidak mengisi kolom tanda tangan”

Nota Palsu

Panitia pelaksana dalam pembuatan LPJ selalu memerlukan Nota untuk bukti pembayaran, tak heran organisasi kemahasiswaan banyak yang membuat nota sendiri, meskipun pada kenyataannya tokoh yang ter tera di dalam nota itu fiktif. Alasanya sulit untuk menemukan tokoh yang bersedia memberikan nota kosong. ada juga yang beralasan suda tidak punya waktu lagi untuk meminta nota, serta ada juga yang mengatakan nota pembelian hilang. Kipli sala satu bendahara HMJ menuturkan;

“kita punya format nota dan itu tingal di print, karena panitia suda lupa menyimpan nota pembelian, ditambah lagi untuk balik meminta nota di tokoh yang agaknya sulit untuk mendapatkannya lagi ”

Pengawasan kegiatan yang bermodalkan kepercayaan

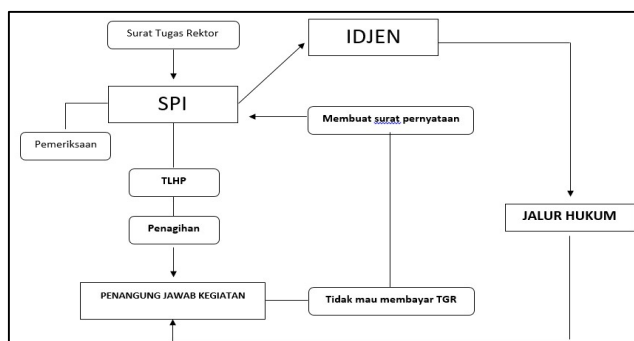
kelima, setelah memasukan laporan pertanggungjawaban kegiatan, pihak kampus melalui Satuan Pengawas Intern (SPI) melakukan pemeriksaan secara teliti guna memastikan bahwa realisasi anggaran benar benar sesuai dengan fakta di lapangan, bila mana ditemukan pada laporan, ada yang tidak sesuai dengan realisasi anggaran dan fakta di lapangan baik berupa administrasi, dokumentasi dan nota pembelian, maka pihak SPI mengembalikan laporan untuk diperbaiki dan dilengkapi, tak heran banyak organisasi kemahasiswaan harus bolak balik untuk memperbaiki laporan. Hal ini dianggap oleh sebagian organisasi kemahasiswaan “terlalu ribet” karena harusnya pihak kampus melakukan pendampingan saat pembuatan laporan, atau pun memberikan pelatihan serta sosialisasi pembuatan laporan yang baik dan benar. Andini bendahara Hmj disalah satu fakultas ekonomi menuturkan dalam hasil wawancara:

“kampus tidak memiliki inisiatif untuk mengadakan pelatihan pembuatan LPJ sehingga kita harus bolak balik untuk memperbaiki LPJ, ditambah lagi tidak ada pendampingan dari pihak kampus saat pembuatan LPJ, kalaupun tidak ada yang mau mendampingi setidaknya kampus membuat pedoman LPJ untuk jadi acuan,””

Alhasil ada dua kegiatan organisasi kemahasiswaan di tahun 2021 tidak memasukan laporan, pihak kampus sampai hari ini masih menunggu tuntutan ganti rugi (TGR) dari yang bersangkutan, karena mulai tahun 2021 sudah di berlaku kan TGR kepada mahasiswa yang sebelumnya di tanggung oleh Wakil Rektor III dan Wakil Dekan III, menurut penuturan pihak SPI dalam wawancara;

“saat ini TGR suda diberlakukan kepada mahasiswa yang bersangkutan sebagai penanggungjawab, di tahun kemarin kami menemukan ada dua orang mahasiswa yang di tuntutan ganti rugi karena tidak memasukan laporan, kami dapat info ternyata yang bersangkutan suda wisuda, jadi kalaupun mereka tidak membayar TGR, maka kan kami serahkan ke IDJEN permasalahan ini untuk selanjutnya di tindaklanjuti ”

Berikut penulis dapat menyajikan lewat hasil wawancara, dalam gambar proses penagihan TGR sampai pada Jalur Hukum;



Gambar 3. Alur Penagihan TGR sampai pada jalur Hukum

Dari fenomena diatas membuktikan bahwa pengawasan baik di dalam pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban sangatlah penting untuk dilakukan.

Potensi Conflict of Interest

Keenam setelah memasukan laporan pertanggungjawaban organisasi kemahasiswaan menunggu proses pencairan honorarium, ditahap ini sering terjadi konflik internal yang menyebabkan rusaknya organisasi, karena Proses pencairan honorarium menggunakan sistem transfer dari bagian keuangan ke rekening panitia masing-masing, dengan begini, ketua organisasi maupun ketua panitia tidak dapat menilai kerja kepanitiaan secara objektif, baik yang kerja maupun yang tidak karena pembagian di sama ratakan kecuali

KSB. Fahrul yang merupakan anggota HMJ di salah satu fakultas ushuludin dan dakwah dalam wawancara menuturkan:

“sempat juga jadi masala di internal karena honor panitia, ada yang merasa tidak adil dengan pembagian, sampai ada yang suda tidak mau aktif lagi di dalam organisasi, kasihan juga sih kak ada yang suda stay dari awal mempersiapkan kegiatan, honor nya disamakan dengan yang kerja di akhir kegiatan, bahkan ada yang sama sekali tidak bantu bantu selama proses kegiatan ”

Penulis mengamati bahwa organisasi kemahasiswaan tidak mengerti manajemen organisasi, seperti pengelolaan kegiatan, sampai pada pelaporan keuangan, karena tidak ada pembinaan aparatur organisasi oleh pihak kampus, yang terjadi adalah konflik internal organisasidan konflik eksternal antara mahasiswa dengan pihak kampus,

Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa interpretasi dari masala diatas yaitu organisasi kemahasiswaan melakukan kecurangan yang diakibatkan oleh pihak kampus yang tidak menata organisasi kemahasiswaan di dalam pengelolaan keuangan, sehingga terkesan bahwa pihak kampus membuka peluang kepada organisasi kemahasiswaan untuk melakukan kecurangan, tidak heran telah terjadi TGR di tingkatan mahasiswa. Karena pembuatan laporan yang dianggap sulit sehingga ada mahasiswa yang tidak memasukan laporan.

Melihat penelitian terdahulu oleh achdiar redy setiawan dalam penelitiannya tentang *“sisi remang pengelolaan keuangan organisasi mahasiswa”* Hasil penelitian menemukan banyak *Fraud* (kecurangan) dalam pengelolaan keuangan baik di tingkatan birokrasi maupun di dalam lembaga organisasi kemahasiswaan intra kampus, Penulis memahami bahwa di dalam penelitian ini membongkar kecurangan organisasi kemahasiswaan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban tetapi tidak kemudian memberikan solusi berupa rekomendasi bagaimana sistem pengelolaan keuangan sehingga terhindar dari kerugian baik dari pihak mahasiswa maupun kampus.

Jika dibandingkan dengan Helianti utami, dalam jurnal *“kecurangan pelaporan keuangan organisasi kemahasiswaan: perspektif crowe’s pentagon theory”* di dalam penelitiannya menemukan bahwa praktek kecurangan organisasi kemahasiswaan disebabkan oleh elemen – elemen *fraud pentagon*. Pada jurnal ini penulis menemukan bahwa ada letak letak kecurangan secara signifikan yang ditemukan melalui teori *pentagon theory* akan tetapi lagi lagi tidak menawarkan bagaimana model pengelolaan keuangan yang baik, berupa rekomendasi

Transformasi sistem pengelolaan keuangan organisasi kemahasiswaan

Transformasi pengelolaan keuangan di dalam organisasi kemahasiswaan sangat dibutuhkan untuk menjadi sebuah road map dalam pengelolaan keuangan organisasi yang berangkat dari permasalahan di atas, transformasi pengelolaan keuangan yang dimaksudkan penulis yaitu Perencanaan organisasi kemahasiswaan, Pengorganisasian dan pengelolaan keuangan organisasi, Pengawasan Organisasi, dan manajemen pembuatan laporan dapat dijabarkan sebagai berikut;

Perencanaan Organisasi Kemahasiswaan

Menurut penulis yang harus di transformasi pada tahap ini dalam sistem perencanaan organisasi kemahasiswaan adalah perencanaan yang berbasis *Empowering* elemen dan *Empowering leadership* memberikan kesempatan kepada bawahan untuk menghargai diri dan kemampuannya (Pearce & Sims,2002) pemimpin memberikan keyakinan kepada karyawan bahwa mereka mampu menghasilkan metode dan ide ide baru berkaitan dengan pekerjaan mereka (Rochani & Wijayati,2020). memberdayakan semua unsur yang terkait dengan masala perencanaan program, menurut penulis bahwa sejauh ini keterlibatan semua unsur baik aparatur organisasi di tingkatan jurusan, fakultas sampai institute tidak pernah dilakukan akibatnya terjadi disorientasi di dalam pengelolaan keuangan organisasi. Adapun tahap pelaksanaan yaitu:

a. Sosialisasi Wakil rektor III dan fungsional keuangan

Ditahap ini pihak kampus harus memberikan informasi secara transparan terkait dengan jumlah dan besaran anggaran yang dialokasikan pada kegiatan kemahasiswaan di tingkatan Jurusan, Fakultas , dan Institute dengan akurat. yang merupakan hasil Rapat kerja Institut.

b. Rapat Kerja Organisasi

Setelah organisasi kemahasiswaan telah mengetahui berapa jumlah dan besaran anggaran, maka dilakukannya rapat kerja organisasi kemahasiswaan untuk merumuskan program kerja dengan berpatokan pada jumlah anggaran yang tersedia, dengan begini organisasi kemahasiswaan akan mudah memilah program kerja yang menggunakan dana kampus dan mana yang tidak begitu juga mana yang Prioritas dan mana yang tidak.

c. Penyelarasan Program di tingkatan Fakultas

Kita ketahui bersama bahwa organisasi kemahasiswaan pada kampus IAIN Gorontalo terdapat dua organisasi yang memiliki peran dan fungsi yang berbeda yaitu HMJ dan DEMA-F sebagai Eksekutif, sedangkan SEMA-F dan SEMA-I sebagai Legislatif. Menyelaraskan program kerja di tingkatan fakultas merupakan langkah yang harus dilakukan karena akan mengetahui bagaimana orientasi program sehingga tetap pada fungsi dan peran organisasi masing-masing, dengan tetap memperhatikan disiplin ilmu jurusan masing-masing (*Job description*). Disamping itu dapat mendukung akreditasi jurusan.

Pengorganisasian dan pengelolaan keuangan organisasi

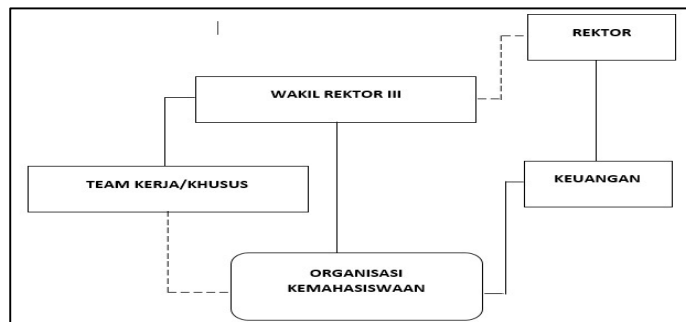
Dari sinilah perlunya pengorganisasian sebagai sebuah ilmu atau sebagai sebuah seni dalam melakukan pengelolaan organisasi tersebut dibutuhkan serta diperlukan oleh manusia itu sendiri (Rachman,2015)

a. Organisasi

Dalam menjalankan roda organisasi harus memahami manajemen organisasi, terlebih lagi soal aturan main di dalam organisasi (*konstitusi*). Pedoman organisasi yang dipakai oleh pihak kampus yaitu mengacu pada Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, di dalam pedoman ini hanya mengatur tentang organisasi dan struktural, tetapi tidak menjelaskan secara eksplisit petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan keorganisasian, maka perlu perumusan kembali pedoman organisasi yang disusun oleh organisasi kemahasiswaan bersama sama dengan pihak kampus untuk di SK kan lebih lanjut oleh Rektor sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan keorganisasian. Sehingga konflik internal dapat dibendung berupa pelanggaran dan kecurangan organisasi kemahasiswaan, karena telah di ikat dengan pedoman organisasi yang di sk kan oleh rektor.

b. Team kerja/Khusus

Dari fenomena diatas organisasi kemahasiswaan dalam melaksanakan kegiatan menilai bahwa proses pengelolaan keuangan oleh pihak kampus belum teratur dengan baik, alasanya proses pencairan anggaran yang membutuhkan banyak waktu, sedangkan mereka dituntut untuk segera melaksanakan kegiatan, maka dari berbagai penuturan di atas dianggap perlu adanya team kerja bidang kemahasiswaan yang membidangi kegiatan organisasi kemahasiswaan mulai dari proses pemasukan permohonan sampai pada pencairan anggaran organisasi kemahasiswaan. Dapat di gambarkan sebagai berikut;



Gambar 4. Skema Team Kerja

Pertama, Team kerja sebagai perpanjangan tangan wakil rektor III bidang kemahasiswaan merupakan wadah komunikasi dan koordinasi dengan mahasiswa yang berkenaan dengan kegiatan kemahasiswaan, memiliki tugas untuk menelaah program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan dengan mengacu pada pedoman organisasi yang telah disusun, selain itu juga memastikan permohonan proposal yang dimasukkan sudah tepat sebelum akhirnya diserahkan kepada Rektor, Metode ini dinamakan dengan (*Screening*) penyaringan. Sehingga mempercepat proses pencairan anggaran. *Kedua*, Memastikan anggaran kemahasiswaan tersedia setiap saat organisasi ingin melaksanakan kegiatan, dengan demikian proses pencairan tidak akan memakan waktu lama, karena anggaran siap sedia. *Ketiga*, melakukan *Mapping* terhadap jumlah kegiatan yang akan dieksekusi secara berkala sehingga realisasi anggaran organisasi bisa tertata dengan baik, ditambah lagi dengan begitu, di akhir tahun anggaran tidak akan tersisa, karena sudah diinventarisir setiap masing-masing organisasi.

Manajemen Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai yang direncanakan. dalam pelaksanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan harus memiliki team pengawas. yang dapat dijabarkan sebagai berikut;

a. Pengawasan internal Mahasiswa

Pada Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang pedoman organisasi kemahasiswaan menjelaskan bahwa senat mahasiswa memiliki fungsi *controlling* terhadap pelaksanaan garis besar haluan program (GBHP) tetapi tidak menjelaskan secara eksplisit porsi pengawasan, maka perlu dilakukan formulasi pengawasan di tingkatan mahasiswa, misalnya di dalam pelaksanaan kegiatan harus juga dilibatkan senat mahasiswa yang ada di tiap-tiap tingkatan baik itu fakultas maupun universitas, sebagai pengawas kegiatan. Bila perlu di SK kan oleh Rektor sebagai bentuk legitimasi dalam melakukan pengawasan.

Yang dilakukan oleh team pengawas yaitu memastikan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan, sesuai dengan Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang telah dirumuskan dalam pedoman organisasi. Adapun organisasi yang diawasi yaitu organisasi eksekutif di tingkatan fakultas yaitu HMJ dan DEMA F yang mengawasi adalah SEMA F sedang di tingkatan universitas yaitu DEMA I yang mengawasi adalah SEMA I

b. Pengawasan eksternal (pihak kampus)

Pihak kampus dalam hal ini bidang kemahasiswaan harus mengambil peran dalam setiap kegiatan mahasiswa termasuk mengawasi aktifitas organisasi kemahasiswaan, yang harus dilakukan adalah memastikan setiap proses pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan pedoman organisasi, melakukan koordinasi dengan senat mahasiswa mengenai pengawasan. Yang diawasi oleh pihak kampus yaitu seluruh organisasi di tingkatan fakultas yang mengawasi adalah wakil dekan III sedangkan organisasi di tingkatan universitas yang mengawasi adalah Wakil rektor III.

Manajemen Pembuatan Laporan

Hal ini cukup sensitif, dalam menyusun laporan harus sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, bila tidak sesuai dan bahkan tidak memasukan laporan maka bisa dikenakan TGR, berangkat dari fenomena di atas, ternyata mahasiswa masih banyak yang menganggap bahwa melakukan manipulasi laporan dianggap wajar dan hal yang biasa di kalangan organisasi kemahasiswaan, karena hal ini sudah turun temurun dari para pengurus terdahulu, alasan mereka cukup logis, karena kampus memberi ruang kepada mereka untuk melakukan manipulasi, bila laporan tidak sesuai dengan format laporan yang ditentukan. bisa diidentifikasi ternyata kampus tidak melakukan telaah terlebih dahulu yang nantinya berdampak pada pelaporan kegiatan mahasiswa. Adapun hal-hal yang harus di transformasi dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban yaitu:

a. Pelatihan pembuatan LPJ

Sepanjang pengalaman penulis yang juga pernah terlibat dalam organisasi kemahasiswaan, tidak pernah ada pelatihan pembuatan LPJ yang diselenggarakan oleh pihak kampus. Maka dalam hal

untuk memperbaiki pengelolaan keuangan organisasi kemahasiswaan, khususnya pada pelaporan di IAIN Gorontalo maka butuh pelatihan pembuatan LPJ. Hal ini dapat mempermudah ormawa dalam pembuatan LPJ. Pelaksanaan pelatihan di mulai saat setelah Pelantikan ormawa.

b. Perumusan Pedoman Pembuatan LPJ

Hal yang saat ini dibutuhkan oleh organisasi kemahasiswaan adalah pedoman pembuatan Laporan Pertanggungjawaban, apabila terdapat pedoman sebagai bahan acuan pembuatan LPJ maka organisasi kemahasiswaan tidak akan menemukan kesulitan dalam pembuatan LPJ. Di dalam pedoman memuat pedoman administrasi, pedoman pengambilan dokumentasi serta pedoman tatacara peng arsipan bukti pembelian/ realisasi anggaran.

c. Pendampingan

Dalam hal pembuatan LPJ, organisasi kemahasiswaan juga harus didampingi saat pembuatan LPJ, hal ini sebagai *Controlling* dalam upaya melahirkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan organisasi kemahasiswaan, Sehingga bisa mencegah dari manipulasi dan kecurangan. Pendamping juga sebagai orang yang ahli dalam pembuatan Laporan, memastikan bahwa sebelum laporan dimasukkan ke pihak kampus laporan tersebut telah selesai.

Pada prinsipnya pengelolaan keuangan organisasi kemahasiswaan tidak boleh dianggap sepele, organisasi merupakan tempat melahirkan mahasiswa yang sadar akan fungsi dan perannya, ketrampilan berorganisasi, manajemen, integritas tinggi, patut ada di setiap mahasiswa, apalagi yang memegang jabatan struktural organisasi kemahasiswaan. Dari sinilah calon-calon pemimpin bangsa. jika keterlibatan mereka di dalam organisasi kemahasiswaan rusak, maka dapat dipastikan kebiasaan melakukan pelanggaran dan kecurangan akan ikut terbawa saat mereka berkehidupan sosial, dan bermasyarakat.

KESIMPULAN

Pada akhirnya hasil penelitian yang peneliti lakukan memberikan pemahaman bahwa pengelolaan keuangan organisasi kemahasiswaan perlu untuk ditransformasi. berangkat dari beberapa temuan, mulai dari proses perencanaan program yang tidak melibatkan unsur secara menyeluruh untuk dijadikan bahan pertimbangan. alhasil terdapat disorientasi pengelolaan keuangan organisasi kemahasiswaan. maka keterlibatan keseluruhan elemen perlu untuk dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan orientasi organisasi kemahasiswaan yang terukur dan ter arah. Selanjutnya proses pencairan anggaran yang dinilai banyak menyita waktu, sehingga organisasi kemahasiswaan harus bersiap dengan konsekwensi perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan. Maka butuh manajemen pengelolaan kegiatan organisasi kemahasiswaan yang telah terjadwal dari awal maupun kesiapan anggaran organisasi kemahasiswaan setiap saat. Selanjutnya keterbatasan organisasi kemahasiswaan dalam berekspresi, ini dibuktikan dengan mata belanja organisasi kemahasiswaan yang hanya berpaku pada ATK, konsumsi, dan honorarium, maka ini perlu dilakukan pengkajian ulang dalam rangka melahirkan organisasi kemahasiswaan yang inovatif. Manipulasi dan kecurangan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban di internal organisasi kemahasiswaan telah mengakar, seolah olah hal itu suda menjadi kebiasaan di tengah tengah organisasi kemahasiswaan. tekanan oleh pihak kampus dengan tuntutan segera memasukan laporan dan tidak adanya pengawasan serta pedoaman umum penyusunan laporan, dapat dilihat bahwa pihak kampus membuka ruang untuk mahasiswa membuat manipulasi dan kecurangan. Identifikasi permasalahan diatas tentu menjadi bahan evaluasi bagi pihak kampus untuk membuat pelatihan pembuatan LPJ serta merumuskan pedoman pembuatan LPJ.

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai kontribusi penulis dalam bentuk rekomendasi ke pihak kampus untuk dapat mengamati dan menganalisis setiap aktifitas kegiatan organisasi kemahasiswaan terutama pada pengelolaan keuangan organisasi kemahasiswaan, mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian dan pengelolaan keuangan, pengawasan sampai pada pembuatan laporan pertanggungjawaban.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya pertama adanya kemungkinan ketidak jujuran narasumber saat menjawab pertanyaan peneliti, kedua adalah keterlibatan informan organisasi kemahasiswaan tidak secara menyeluruh baik di tingkatan jurusan, fakultas maupun institut adapun yang menjadi informan yaitu masing masing fakultas hanya perwakilan satu atau dua jurusan, anggota pengurus DEMA-F dan salah satu anggota SEMA-I , keterbatasan ketiga adalah belum melibatkan informan di level pimpinan baik fakultas (wakil dekan III)

maupun di level Universitas (WAKIL Rektor III), hanya melibatkan fungsional keuangan dan sekretaris Satuan Pengawas Intern (SPI).

Untuk melengkapi penelitian ini penulis memberikan saran, pertama kepada pihak kampus yaitu, melakukan pembinaan aparatur organisasi kemahasiswaan dalam setiap aktivitas organisasi, merumuskan peraturan organisasi secara kolektif baik mahasiswa dan pihak kampus, melakukan monitoring dan evaluasi (*money*) terhadap kerja kerja organisasi, serta melahirkan pedoman pembuatan laporan pertanggungjawaban untuk mempermudah pembuatan LPJ sehingga terhindar dari tuntutan ganti rugi (TGR) di kalangan mahasiswa. Kedua kepada peneliti yaitu penelitian selanjutnya dapat melakukan pengembangan dari penelitian ini, dapat melakukan penelitian secara menyeluruh melibatkan semua unsur baik mahasiswa dan pihak kampus.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajuna, L.H. (2021). The relevance of Islamic religiosity, Islamic work ethics, and job satisfaction of employees in Islamic financial institution In Gorontalo. *Al-Istishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 13 (1), 137-150.
- Damayanti Yustika,(2021) “Pengaruh *Empowering* terhadap kinerja guru dengan *Psychological empowerment* sebagai variabel mediasi” *Jurnal Ilmu Manajemen* Volume 9 no.2 (2021)
- Iswandir,(2021) “Dasar dasar proses pengawasan dalam organisasi” *Journal Universitas surya darma* volume 1 no.1
- Moleong, L, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Mu'minah Himmah, (2019) *Pengelolaan keuangan: (Studi kasus pada usaha mikro omah kripik mbote kabupaten malang*. (Skripsi strata satu, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019) diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/15509/1/15510110.pdf>
- Nasukah Binti, Winarti Endah. “Teori Transformasi dan Implikasinya Pada Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam” *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management* Volume 2 no.2 (2021):179
- Pemerintah Indonesia. *Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*
- Pemerintah Indonesia. *Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155 tahun 1998 tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi*. Jakarta
- Pemerintah Indonesia. *Undang Undang (UU) 1945 pasal 28 E tentang kebebasan berserikat*. Jakarta
- Pemerintah Indonesia. *Undang Undang (UU) Nomor 09 tahun 1998 tentang kebebasan berpendapat*. Jakarta
- Puspitasari, Hariyadi., Setiawan. “Sisi Remang Pengelolaan Keuangan Or Mahasiswa” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL* Volume 6,no.2,(2015):133
- Siona sisilia, (2021) *Peran Organisasi Kemahasiswaan IMAHAGI (Ikatan mahasiswa geografi Indonesia) dalam pengembangan diri mahasiswa pendidikan geografi Universitas Muhammadiyah Mataram* (Skripsi strata satu, Universitas Muhammadiyah Mataram 2021) diakses dari <https://repository.ummat.ac.id/2605/1/COVER-BAB%20III.pdf>
- Sunaryo, Helianti Utami. “Kecurangan Pelaporan keuangan Organisasi Kemahasiswaan: Perspektif *crowe's fraud pentagon theory*” *Jurnal Akuntansi aktual*, ISSN: 2087-9695,(2020):51
- Syukur Muhammad, Agustang Andi, Idhkan Andi Muhammad Dkk,(2022) “Konsep organisasi dan pengorganisasian dalam perwujudan kepentingan manusia” *Jurnal manajemen sumber daya manusia, administrasi dan pelayanan publik* volume IX no.1